

ISSN: 2087-7900

JURNAL
POLITICA

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 6 NO.1, MARET 2015

Penanggung Jawab:

Kepala P3DI (Dr. Rahaju Setya Wardani)
Kepala Bidang Pengkajian P3DI (Ety Tiyastuti)

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. (Hubungan Internasional)

Dewan Redaksi:

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. (Hubungan Internasional)
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. (Politik Dalam Negeri)
Riris Katharina, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara)
Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. (Hubungan Internasional)
Drs. Ahmad Budiman, M. Pd. (Komunikasi Politik)

Pelaksana Redaksi:

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Dewi Sendhikasari, D. S.IP., MPA

Staff Redaksi:

Musbiyatun, Panji Fitrianto

Mitra Bestari:

DR. Lili Romli, M.Si. (Perkembangan Politik Nasional, LIPI)
DR. Ganewati Wuryandari, MA. (Hubungan Internasional, LIPI)
Prof. DR. Irfan Ridwan Maksum, M.Si. (Administrasi Negara, UI)

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Setjen DPR RI, Gedung Nusantara I, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Telp : 021-5755987 Fax : 021-5756067
Email : jurnal.politica@yahoo.com

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Naskah diketik sesuai dengan format yang tercantum pada halaman belakang
(Lihat pedoman penulisan)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii-iv
Abstrak.....	v-ix
Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan) <i>oleh: Prayudi</i>	1-19
Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia <i>oleh: Lukman Adam</i>	20-41
Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat <i>oleh: Simela Victor Muhamad</i>	42-62
Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia <i>oleh: Adirini Pujayanti</i>	63-86
Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis <i>oleh: Aryojati Ardipandanto</i>	87-106
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Terbitnya *Jurnal Politica*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2015 merupakan kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya. *Jurnal Politica* yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI adalah wadah bagi tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada edisi kali ini terdapat 5 (lima) tulisan yang mengupas beberapa persoalan yang dibahas secara padat oleh beberapa penulis yang menyangkut isu-isu strategis yakni tentang Politik Pembinaan dan Pengawasan Provinsi terhadap Kabupaten/Kota, Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia, Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba, Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia, serta Problematika Pelaksanaan Pilpres 2014.

Tulisan pertama disampaikan oleh Prayudi yang mengangkat persoalan bagaimana politik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan provinsi terhadap kabupaten/kota. Penulis melihat bahwa realitas politik Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) masih lemah dalam membangun perlakuan yang konstruktif di antara tingkatan pemerintahan. Dengan mengambil hasil penelitian di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, penulis menyimpulkan bahwa kelemahan ini berasal dari saling keterkaitan dua faktor seperti ketidaktegasan dari sikap Pemerintah itu sendiri terhadap daerah, dan keterbatasan wewenang gubernur berhadapan dengan luasnya otonomi kabupaten/kota. Penulis menyarankan penguatan kewenangan politik gubernur untuk mengelola pemda, termasuk memberikan hukuman bagi kepala daerah kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak mengikuti arahan program provinsi.

Tulisan kedua disampaikan oleh Lukman Adam berjudul “Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia” menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan konektivitas maritim dapat dibagi dua, yaitu: aspek internal kepelabuhanan, dan aspek eksternal. Agar tujuan dari pengembangan konektivitas maritim tercapai, maka diperlukan sejumlah perbaikan yang terdiri dari peningkatan fasilitas infrastruktur, ketersediaan energi, inovasi teknologi dan informasi, kualitas sumber daya manusia, pendanaan, dan kapasitas eksisting. Selain itu, juga perlu penurunan terhadap waktu bongkar-muat dan birokrasi perizinan.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Simela Victor Muhamad yang melihat bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia makin marak dilakukan oleh sindikat internasional. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan pasar potensial dan menguntungkan bagi pemasaran narkoba. Sindikat internasional, melalui jaringan lintas batas dan berbagai modus, terus berupaya melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, dan oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengatasinya. Tulisan ini diambil dari hasil penelitian di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

Tulisan keempat disampaikan oleh Adirini Pujayanti yang mengupas tentang Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia. Penulis berpandangan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Hal tersebut ditempuh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan *soft power* sebagai negara pemberi bantuan dalam Kerja sama Selatan Selatan (KSS) antarnegara berkembang. Peran aktif dalam KSS juga menjadi politik *prestise* bagi Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui manfaat keterlibatan aktif Indonesia di KSS. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Surabaya, Jawa Timur dan Gorontalo.

Tulisan kelima atau terakhir ditulis oleh Aryojati Ardipandanto yang membahas tentang Permasalahan Pelaksanaan Pilpres 2014 lalu. Dalam beberapa hal memang pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik dari pada pelaksanaan Pileg 2014, misalnya terkait transparansi proses penyelenggaraan Pilpres. Hal-hal yang masih belum optimal implementasinya antara lain adalah terkait DPT yang masih belum akurat, adanya praktek kampanye hitam, penyelenggara pemilu dan media massa yang kurang bisa menjaga netralitasnya. Permasalahan DPT dapat diatasi dengan pemberian otoritas sumber data kependudukan pada satu lembaga saja. Praktik kampanye hitam serta keberpihakan politik oleh penyelenggara pemilu dan media massa dan lembaga dapat diminimalisir dengan penyempurnaan regulasi Pilpres dan penegakkan hukum yang adil dan tegas.

Demikianlah pengantar redaksi atas 5 (lima) tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Redaksi berharap agar semua tulisan yang tersaji pada edisi kali ini dapat memberikan inspirasi, menjadi bahan informasi, serta menjadi alternatif solusi dalam proses pengambilan keputusan dan/ atau bagi pembaca secara keseluruhan yang tertarik dengan isu-isu dimaksud. Namun demikian, redaksi menyadari jika masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin tersaji dalam edisi kali ini. Untuk itu redaksi berharap agar pembaca memberikan masukan atas sajian jurnal ini pada umumnya dan tulisan-tulisan ini pada khususnya. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si., Dr. Ganewati Wuryandari, keduanya Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta kepada Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, Guru Besar Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Maret 2015

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prayudi

Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota
(Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)

Realitas politik Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) masih lemah dalam membangun perlakuan yang konstruktif di antara tingkatan pemerintahan. Berdasarkan data-data dari hasil penelitian di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, kelemahan ini berasal dari saling keterkaitan dua faktor seperti ketidaktegasan dari sikap Pemerintah itu sendiri terhadap daerah, dan keterbatasan wewenang gubernur berhadapan dengan luasnya otonomi kabupaten/kota. Penulis menyarankan penguatan kewenangan politik gubernur untuk mengelola pemda, termasuk memberikan hukuman bagi kepala daerah kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak mengikuti arahan program provinsi.

Kata kunci: kontrol politik, Binwas, pusat-daerah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan.

Prayudi

*Political Control of Province Towards Municipality/Regency:
Cases of Bangka Belitung and South Sulawesi Provinces*

The role of Binwas in developing constructive relations among leaders from different level of government is arguably still weak. The writer reveals that the weaknesses come from relations of two factors, namely indecisiveness the central government towards the regions, and the limit of the power of governors to control regents or majors who have more authority today. This article is part of the 2014 field research conducted in the provinces Bangka-Belitung and South Sulawesi, which uses qualitative method. To cope with his finding, in the one side, the writer recommends the empowerment of political power of governors to supervise the performance of its lower officials in the regions. On the other side, he proposed punishment for regents/majors who did not follow guidance from higher government officials.

Keywords: political control, Binwas, centre-region, Bangka Belitung, South Sulawesi.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Lukman Adam

Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia

Pengembangan konektivitas maritim dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, menyebabkan perlunya penguatan sarana dan prasarana kemaritiman untuk melakukan kegiatan distribusi barang dan sarana transportasi laut. Sampai saat ini terindikasi bahwa masih banyak inefisiensi dalam transportasi laut domestik. Tulisan ini merupakan sebuah kajian yang berupaya memahami rencana tol laut yang akan dilakukan pada pemerintahan periode ini, kendala yang dihadapi, dan kebijakan yang diperlukan guna mewujudkan rencana tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan konektivitas maritim dapat dibagi dua, yaitu: aspek internal kepelabuhanan, dan aspek eksternal. Agar tujuan dari pengembangan konektivitas maritim, maka diperlukan sejumlah perbaikan yang terdiri dari peningkatan fasilitas infrastruktur, ketersediaan energi, inovasi teknologi dan informasi, kualitas sumber daya manusia, pendanaan, dan kapasitas eksisting.

Kata kunci: transportasi laut domestik, konektivitas maritim, kepelabuhanan, infrastruktur pelabuhan, Indonesia, bongkar-muat.

Lukman Adam

Maritime Connectivity Policy in Indonesia

Maritime connectivity must be developed to improve competitiveness and availability of products. Indonesia's geographical condition, dominated by the sea, needs the improvement of its maritime infrastructure to smoothly convey distribution of goods and the quality of its transportation. Until recently, it is found that there are inefficiencies in the country's marine transportation. This paper studies the new government's proposal of "sea toll" and its possible problems in its realization. In more details, the writer evaluates that there will be two main problems in the realization of the maritime connectivity, consisting of internal and external aspects. Meanwhile, for its success, the writer argues that improvements of port facilities, energy supply, information technology, human resources, and so forth.

Keywords: domestic marine transportation, maritim connectivity, port, facilities, port infrastructure, Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Simela Victor Muhamad

Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia:
Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat

Penyelundupan narkoba ke Indonesia makin intens dilakukan oleh sindikat internasional. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan pasar potensial dan menguntungkan bagi pemasaran narkoba. Sindikat internasional, melalui jaringan lintas batas dan berbagai modusnya, terus berupaya melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, dan oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengatasinya. Tulisan ini, bagian dari laporan penelitian 2014, membahas hal tersebut, utamanya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, dua daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan rentan dari penyelundupan narkoba.

Kata kunci: penyelundupan narkoba, kejahatan transnasional, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Malaysia, Indonesia.

Simela Victor Muhamad

*Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia:
Cases in the Provinces of Riau Islands and West Kalimantan*

Drugs smuggling organized by international syndicates into Indonesia tends to increasingly intensity. This can occur since Indonesia is a potential and profitable market. International syndicates with its cross-border networks and various methods, continues to smuggle its drugs into Indonesia. As form of transnational crime, drugs smuggling into Indonesia cannot be tolerated, thus, effective efforts must be found to handle it. This article, as part of the 2014 research report, discussed these issues, which focuses drugs smuggling, primarily to the Province of Riau Islands and West Kalimantan, two areas bordering Malaysia and vulnerable from drug smuggling.

Keywords: drugs smuggling, transnational crime, Riau Islands, West Kalimantan, Malaysia, Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Adirini Pujayanti

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Hal tersebut ditempuh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan *soft power* sebagai negara pemberi bantuan dalam Kerja sama Selatan Selatan (KSS) antar negara berkembang. Peran aktif dalam KSS juga menjadi politik prestise bagi Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat keterlibatan aktif Indonesia di KSS. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Surabaya, Jawa Timur dan Gorontalo. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan KSS berdaya guna untuk meraih dukungan bagi kepentingan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun belum bermanfaat banyak bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah.

Kata kunci: kerja sama Selatan-Selatan, kebijakan luar negeri Indonesia, *soft power*, kepentingan nasional.

Adirini Pujayanti

South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia

Indonesian foreign policy is always mentioned by the country's leaders for the sake of achieving national interest. Under the SBY administration, its implementation is carried out by introducing its soft power policy, by offering foreign aids, performing its new role as donor to developing countries through South-South Cooperation (SSC). It is considered by the Indonesian leaders that performing an active role in SSC would give political benefit or positive image for the country. This paper resulted from research report conducted in 2014, adopting a qualitative method of analysis with collecting data activities in Surabaya and Gorontalo. The research is aimed to know how far Indonesia can take benefits from SSC. Its finding concludes that the country's involvement is intended to gain political support from developing countries for the country's political interest in international arena. Unfortunately, it has not yet given significant contribution for the country's economic development, especially in the regions.

Keywords: South-South cooperation, Indonesia foreign policy, soft power, national interest.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Aryojati Ardipandanto

Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis

Tulisan ini membahas tentang problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Dalam beberapa hal memang pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik daripada pelaksanaan Pileg 2014, misalnya terkait transparansi proses penyelenggaraan Pilpres. Hal-hal yang masih belum optimal implementasinya antara lain adalah terkait DPT yang masih belum akurat, adanya praktek kampanye hitam, penyelenggara pemilu dan media massa yang kurang bisa menjaga netralitasnya. Permasalahan DPT dapat diatasi dengan pemberian otoritas sumber data kependudukan pada satu lembaga saja. Praktek kampanye hitam serta keberpihakan politik oleh penyelenggara pemilu dan media massa dan lembaga dapat diminimalisir dengan penyempurnaan regulasi Pilpres dan penegakkan hukum yang adil dan tegas.

Kata kunci: Pilpres 2014, daftar pemilih tetap, kampanye hitam, netralitas politik, KPU.

Aryojati Ardipandanto

Weaknesses Of The 2015 Presidential Elections: An Analysis

This paper discusses the 2014 Presidential Election, in particular its strengths and weaknesses. It is reveals here its main strength lies in its transparency in its process, moreover in public access to information. Some weaknesses connected with the accuracy of voter list, black campaign, and the neutrality of Election Board (KPU), mass media, and quick count institutions. The writer underlined that the problem of the accuracy of voter list can be solved by giving authority to single institution in keeping population data. Meanwhile, black campaign and neutrality of the three different institutions can be overcome by amending Presidential Election Law and strengthening its enforcement.

Keywords: the 2015 presidential election, voter list, black campaign, political neutrality, KPU.